

## Gagasan

2 Bulog Kini Lebih Baik

## Wacana

3 Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham

# BAMBOEDOEA

## Raih Penghargaan IPRA



penyenggaraan pilkada dalam waktu yang sangat terbatas dengan wilayah yang sangat luas ditambah objek yang banyak dan penyelenggaraan serentak sungguh merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Namun, hasilnya sangat memuaskan," ungkap Teddy. "Kemenangan KIP Mediacenter adalah hal yang sangat pantas karena memberikan dampak positif bagi perkembangan Aceh di masa mendatang," tambah Teddy.

Heri Rakhmadi, Direktur Bamboedoea Communications yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan rasa bangganya karena turut memberi andil dalam proses perdamaian Aceh. "Penghargaan ini adalah apresiasi kepada masyarakat Aceh dan kerja keras seluruh penyelenggara Pilkada termasuk dukungan media cetak dan elektronik serta UNDP yang mendukung program ini," katanya.

Lebih lanjut Heri Rakhmadi menyatakan bahwa kemenangan ini adalah yang kedua kalinya. Pada 2005 Bamboedoea, melalui Program Kampanye Damai Pemilu 2004, memperoleh penghargaan **Honorable Mention** pada IPRA *Golden World Award* (GWA) di Istanbul, Turki.

### Sekilas IPRA

IPRA *Indonesia Award*, yang merupakan bagian penyelenggaraan IPRA *Golden World Award*, dilaksanakan secara reguler (setiap tahun) untuk memberikan penghargaan bagi program *Public Relations* yang memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Selain Bamboedoea Communications, pemenang lainnya adalah Garuda Indonesia untuk kategori *Crisis Management* dengan topik "Penanganan Musibah GA-200". Posisi kedua diraih oleh Indo Pacific Edelman dan Stratcom Indonesia yang memenangkan *Certificate of Recognition* yang masing-masing mengukung program "Hail the King-Intel Core duo Indonesia Launch" dan *Placing Crispy Cream As Doughnut to Have*.

IPRA adalah lembaga profesi bagi praktisi PR yang beranggotakan lebih dari 1.000 top level profesional di 110 negara. Saat ini IPRA Internasional berumur 52 tahun dan berkantor pusat di London. IPRA dimaksudkan untuk meningkatkan standar dan kualitas praktik sekaligus memperbaiki kualitas dan efisiensi PR di seluruh belahan dunia.

**S**ukses Pilkada Aceh yang dilaksanakan secara demokratis pada Desember 2006 rupanya terus menuai penghargaan. Setelah dipuji kalangan Internasional atas sukses dan demokratisnya pilkada terbesar di Indonesia itu, giliran **IPRA** (*International Public Relations Associations*) Indonesia yang memberikan penghargaan kepada Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications selaku pengelola komunikasi terpadu Pilkada Aceh (KIP Mediacenter Aceh).

Menurut Elizabeth G Ananto, Ketua Tim Juri IPRA Indonesia Award 2007, Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications mendapatkan penghargaan terbaik I pada **kategori Overall Institutions** atas upayanya mensosialisasikan Pilkada Aceh, sehingga berjalan aman dan demokratis. "Sulit membayangkan Pilkada Aceh di bekas daerah konflik itu berlangsung damai tanpa adanya sosialisasi yang baik," jelas Elizabeth se usai penyerahan penghargaan.

Penghargaan berupa *Certificate of Excellence* dan *tropy Public Relations* disampaikan oleh Philip Sheppard, President IPRA Internasional, didampingi Teddy Kharsadi, IPRA *National Chair* pada 5 September 2007 dalam acara IPRA *Regional Conference* di Bali yang dihadiri 199 peserta dari 21 Negara.

Teddy Kharsadi menyatakan bahwa kemenangan KIP Mediacenter Aceh seakan-akan menegaskan penyelenggaraan Pilkada Aceh memang sangat luar biasa. "Mensosialisasi



Deklarasi Damai Pilkada Aceh 2006



Heri Rakhmadi

### Sertifikasi Piar

Belakangan ini sedang marak wacana untuk mensertifikasi profesi *public relations* (PR). Wacana ini muncul lantaran profesi ini memang sedang banyak dibutuhkan di tengah persaingan bisnis yang begitu tajam. Kini, perusahaan institusi pemerintahan berlomba-lomba memperbaiki kinerja komunikasi, meningkatkan citra, dan menjaga reputasi. Bahkan, ada yang hanya sekedar memoles citra perusahaan agar terdengar baik-baik saja.

Oleh karena kebutuhan yang meningkat tersebut, profesi PR kemudian menjadi profesi yang dibutuhkan. Profesi ini tumbuh pesat dengan berbagai nama dan jenis yang ditawarkan, mulai dari sekedar *event organizer*, *marketing public relations*, *strategic public relations*, hingga *integrated public relations*.

Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul gagasan untuk mensertifikasi profesi ini layaknya profesi dokter yang wajib mendapatkan ijin praktek sebelum melakukan praktek pengobatan. Ide sertifikasi ini terdengar baik karena bisa menjamin kualitas dan mutu jasa praktisi humas. Namun jika sertifikasi dilakukan untuk menciptakan *entry barrier* bagi pendatang baru, hal ini menggambarkan kegamaan dan kekhawatiran yang berlebihan dari praktisi PR.

Sertifikasi dan akreditasi hanya akan menambah rantai birokrasi dan menghambat orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk terjun dan masuk profesi ini. Ingat, kompetisi memacu kualitas. Lagi pula, di Indonesia masalah terbesar profesi PR adalah kue bisnis humas yang memang belum besar, bukan karena praktisi PR yang semakin banyak.

Selain itu, profesi ini adalah profesi terbuka, tidak seperti notaris atau dokter yang harus menjalani pendidikan tertentu lalu mendapat sertifikasi profesi. Profesi kehumasan tidak melihat latar belakang, sangat beragam, dari sarjana periklanan sampai sarjana perikanan, dari PTN sampai dari IAIN. Dilihat praktisi PR sekarang, ada yang punya gelar dokter, dokter farmasi, mantan wartawan, pengamat politik, mantan dai, hingga latar belakang teknik. Bahkan, tidak sedikit artis dan selebritis menjalankan profesi ini. Semua itu tidak masalah, yang penting adalah profesionalisme dan kemampuan dalam bekerja.

Pada saat ini, akreditasi dan sertifikasi bukan prioritas utama. Yang penting adalah meningkatkan kesadaran organisasi dan lembaga akan pentingnya PR, memperbesar kue bisnis PR, dan menciptakan perlindungan bagi praktisi humas. Caranya, pertama, membuat standarisasi *rate*. *Rate* harus ditentukan berdasarkan pengalaman perusahaan. Jangan hanya ditentukan semata oleh pasar. Karena itu harus ada *grading*, sehingga profesi humas bisa lebih dihargai seperti profesi lainnya. Kedua, merumuskan aturan untuk mengikat lembaga penyelenggara *tender/bidding/pitching* agar membayar perusahaan humas yang diundang untuk ikut serta. Perusahaan humas sudah bekerja keras melakukan riset, mengkaji permasalahan, dan merumuskan solusi. Jangan sampai *pitching* hanya jadi alat **mencari dan mencuri ide**.

Melihat pada kejadian-kejadian ini, sekarang menurut saya yang penting bukanlah sertifikasi dan akreditasi. Namun yang lebih penting, adanya regulasi untuk menjamin kelangsungan sistem bisnis dan profesi PR.



### Kini Lebih Baik



kepercayaan kepada Perum Bulog. Jika semula kredit perbankan dibebankan sebesar 3,5%, kini perum Bulog hanya menanggung 2%. Artinya, Perum Bulog dapat menghemat hingga 2 miliar rupiah dari penurunan suku bunga kredit tersebut.

Bukan hanya itu, Perum Bulog kini juga dipercaya dan diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Kewenangan stabilisasi komoditas (pangan/sembako) selama ini dikelola bersama oleh berbagai lembaga, seperti Depperindag, Menko Ekonomi, Menko Keuangan, dan termasuk perum Bulog. Namun, kini stabilitas harga beras cukup dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Kepercayaan bertubi-tubi kepada Perum Bulog bukanlah tanpa sebab. Bisa jadi kepercayaan itu muncul karena citra Bulog telah membaik. Riset media Bamboedoea communications yang dilakukan sepanjang Mei, Juni, Juli hingga Agustus 2007 bisa menegaskan membaiknya citra tersebut. Pada Mei, Juni dan Juli 2007, kepercayaan media yang ditandai dengan berita positif sebanyak 60%. Memasuki Agustus 2007 berita positif meningkat menjadi 75%, berita netral 20, dan berita negatif hanya 5% dari 20 media yang dimonitor setiap harinya. Coba bandingkan riset media yang juga dilakukan oleh Bamboedoea pada April 2006 sampai bulan April 2007, berita positif hanya sebesar 5% dan selebihnya 95% adalah berita buruk.

Heri Rakhmadi, Direktur Bamboedoea Communication sebagai konsultan komunikasi Perum Bulog, menyatakan bahwa cepatnya pemulihan citra Perum Bulog lantaran cepat dan responsifnya manajemen baru menetapkan langkah-langkah pemulihan Perum Bulog yang didukung kerja keras serta kerja nyata seluruh jajaran karyawan Bulog. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dukungan media serta strategi komunikasi dan Informasi yang diciptakan.

Sebelum 21 Maret 2007, apa yang anda bayangkan jika mendengar Perusahaan Perum Bulog?. Bisa ditebak, bayangan Anda pasti sebuah perusahaan yang sarat dengan masalah, mulai dari kasus impor sapi bermasalah, harga beras yang membumbung hingga kasus penyalagunaan keuangan serta korupsi yang memenjarkan sebagian para pimpinannya.

Namun, kini sejak dipimpin oleh manajemen baru, sedikit demi sedikit citra lembaga pangan bangsa ini membaik. Berbagai parameter terlihat dari kinerja dan membaiknya citra Perum Bulog ini, di antaranya meningkatnya kepercayaan masyarakat (baca petani), sehingga berbondong-bondong petani tersebut menjual hasil panennya ke Bulog. Karena kepercayaan petani tersebut, alhasil pengadaan gabah/beras Bulog melebihi target yang telah ditetapkan. Besarnya pengadaan dalam negeri ini berdampak kepada stabilnya harga beras yang jarang terjadi menjelang hari besar agama, seperti puasa dan lebaran.

Kepercayaan masyarakat tersebut rupanya menimbulkan efek yang besar karena pihak perbankan pun menaruh



## Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham Diperkenalkan



Menkumham Andi Matlata meninjau press room di Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham

Kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sejak 18 September 2007 Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) atau Media Center Depkumham diperkenalkan oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Sejak saat itu masyarakat akan dapat mengakses peraturan perundang-undangan di Departemen Hukum dan HAM baik secara langsung ataupun melalui akses internet.

"Ini sejarah baru bagi Departemen Hukum dan HAM," kata Menkumham di sela-sela kunjungannya di ruang PIK Depkumham. Menkumham mengharapkan publik dapat memanfaatkan PIK dengan sebaik-baiknya, sehingga akan berimbas pada kuatnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan sosialisasi produk perundang-undangan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif hanya akan berjalan apabila ada kesadaran hukum yang cukup tinggi di masyarakat. Dan

untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, tentu saja pengetahuan masyarakat akan hukum dan perundang-undangan haruslah memadai. Untuk itu, masyarakat harus memiliki akses yang seluas-luasnya atas segala informasi hukum.

Dalam kunjungannya ke PIK, Menkumham mendapatkan penjelasan lengkap dari Heri Rakhmadi, Direktur Bamboedoea Communications yang mengelola Mediacyter tersebut. Heri menyatakan bahwa PIK akan merancang dan mengeksekusi program komunikasi terpadu, sehingga publik mampu mendapatkan informasi lengkap mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan program lainnya di Departemen Hukum dan HAM.

Untuk tujuan tersebut, PIK Depkumham dikelola oleh tim profesional sebanyak 14 orang yang bekerja selama 18 Bulan. Selain itu, PIK dilengkapi dengan fasilitas, yang lengkap seperti ruang kerja media yang nyaman, akses internet cepat, dan pelayanan yang bersahabat. Program ini sepenuhnya didukung oleh UNDP.

Untuk mengakses informasi dapat dilakukan via [www.hukumham.info](http://www.hukumham.info). Sementara itu pengaduan dapat dilakukan via [email aspirasi@hukumham.info](mailto:aspirasi@hukumham.info) atau melalui sms 0818 101022.



## BAMBOEDOEA

## Di Pilkada Jakarta

Walaupun dikuatirkan Pilkada DKI akan berakhir rusuh, ternyata Pilkada tersebut ternyata berlangsung aman dan damai. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan lantaran calon gubernur hanya ada dua pasangan yang dapat pertarungan vertikal antar

pendukung calon.

Apa rahasianya? Menurut Juri Ardiantoro, Ketua KPU DKI Jakarta, penyebabnya adalah lancarnya komunikasi KPU kepada publik. Bamboedoea merasa bangga karena berkesempatan berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi pilkada kepada masyarakat melalui website yang beralamat di [www.kpujakarta.info](http://www.kpujakarta.info)

Website ini berisi berita terkini tentang perkembangan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, data-data terbaru tentang Pilkada seperti visi-misi dan profile pasangan calon, foto-foto kegiatan Pilkada jumlah Pemilih, surat suara, TPS, dan data-data faktual lainnya misalnya laporan jumlah dana kampanye dan jumlah perolehan suara pasangan calon baik yang di hitung manual maupun elektronik (penghitungan cepat).

Website [kpujakarta.info](http://kpujakarta.info) juga melakukan peliputan seputar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada, sehingga setiap saat masyarakat dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung dalam Pilkada. Selain dilengkapi kotak masukan dari masyarakat, website ini juga dilengkapi running teks yang berisi flash news, yang sangat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat terutama menjelang hari pemungutan suara.



# Senggang

Dalam menjalankan kegiatan konsultan PR, tim Bamboedoea turun langsung ke lapangan mendampingi klien dalam menjalankan program komunikasi



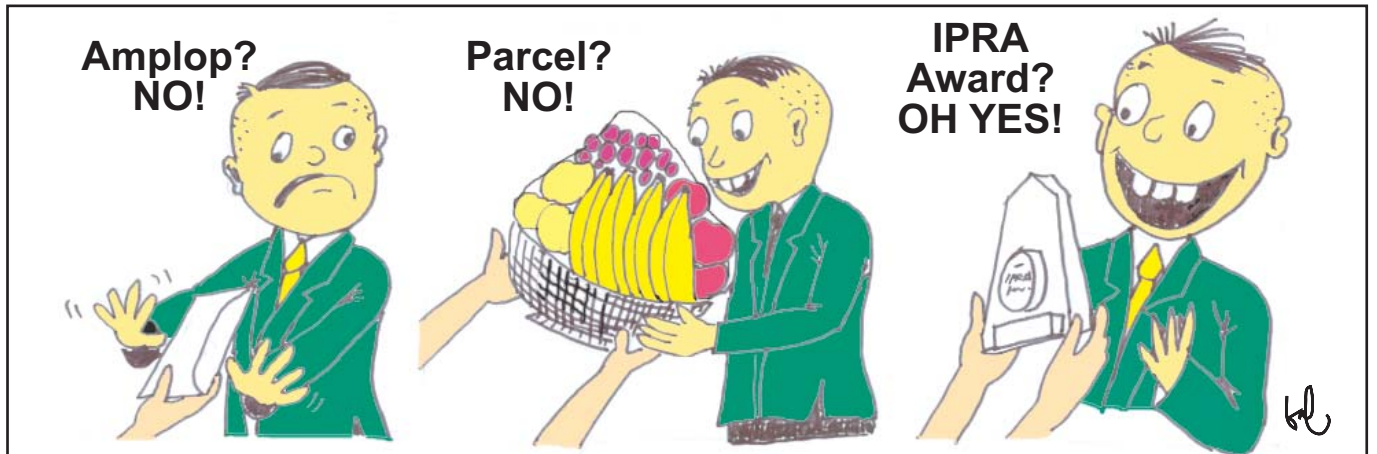
Dirut Perum Bulog mengunjungi Harian Suara Merdeka Semarang

Karnaval becak Pilkada Aceh untuk membangun persepsi rasa aman

Selamat **QDUL FITRI** 1 Syawal 1428 H

Mohon maaf lahir batin

**Komunikartun** by baloemar



**Inspirasi**

Pimpinan Redaksi: Heri Rakhmadi,  
Penulis: Andi Irman, Airin, Oddi Arma, Wiry Kusuma Sekretaris Redaksi: Nita Saptarini,  
Grafis: Iqbal, Wahyu, Fajri, Alamat: Jl.Cakra Wijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum Jakarta Timur - 13420 Telp. +62 21 8591 2743 - 44, Fax. +62 21 856 0408  
<http://www.bamboedoea.com>, e-mail:bamboedoea@bamboedoea.com